

3. Bersama ini sebagai bahan pertimbangan disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari :
 - a. akta pendirian dan/atau perubahan terakhir;
 - b. bukti pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan hukum;
 - f. surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
 - g. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek, bermeterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan;
 - h. Surat Pernyataan Kesanggupan memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor, bermeterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan;
 - i. Surat Perjanjian antara pemilik kendaraan atau anggota koperasi dengan perusahaan Angkutan Umum yang berbentuk badan hukum Koperasi;
 - j. memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan mampu menampung sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki dan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pemerintah Daerah setempat yang menyatakan luasnya mampu menyimpan kendaraan sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki; dan
 - k. rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan yang dituangkan dalam bentuk dokumen.
4. Dalam hal permohonan kami dapat disetujui, kami bersedia untuk menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Pelayanan Angkutan serta sanggup untuk melaksanakan semua ketentuan dan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak dalam Trayek selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah permohonan ini disetujui.
5. Demikian permohonan kami dan atas perkenan Bapak, kami ucapkan terimakasih.

PIMPINAN PERUSAHAAN/KOPERASI,

Meterai

Rp6000,-
(Nama Jelas)

Tembusan:

- 1.
- 2.
3. dst.

PERMOHONAN PEMBARUAN MASA BERLAKU IZIN PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

NAMA PERUSAHAAN / KOPERASI *)

Alamat lengkap Nomor Telepon

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Pembaruan Masa
Berlaku Izin Penyelenggaraan
Angkutan Orang Dengan Kendaraan
Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek
Pelayanan

Kepada
Yth.

di-

.....

1. Mengacu pada Pasal 179 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, bersama ini kami dari PT./Koperasi.....mengajukan permohonan pembaharuan masa berlaku Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Pelayanandengan data sebagai berikut:
 - a. Keterangan Pemohon
 - 1) Nama Perusahaan :
 - 2) Nama Pimpinan Perusahaan :
 - 3) Alamat Perusahaan Lengkap termasuk:
 - a) Nomor Telepon dan Faksimili :
 - b) E-mail :
 - b. Keterangan Izin Penyelenggaraan
 - 1) Nomor SK Izin Penyelenggaraan :
 - 2) Masa Berlaku SK Izin Penyelenggaraan :
 - 3) Nomor Surat Pelaksanaan Keputusan Izin :
 - 4) Masa Berlaku Surat Pelaksanaan Keputusan Izin :
 - 5) Jumlah Kendaraan yang Diizinkan :Unit
 2. Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek /Kartu Pengawasan telah habis masa berlakunya sehingga perlu adanya pembaharuan untuk dapat memberikan pelayanan angkutan dimaksud.
 3. Bersama ini sebagai bahan pertimbangan disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari :
 - a. surat permohonan pembaruan masa berlaku izin;
 - b. salinan Keputusan Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang telah dimiliki;
 - c. salinan surat tanda nomor kendaraan bermotor yang masih berlaku atas nama perusahaan
 - d. salinan bukti lulus uji berkala kendaraan yang masih berlaku; dan
 - e. laporan pelayanan angkutan tidak dalam trayek.
 4. Dalam hal permohonan kami dapat disetujui, maka kami bersedia untuk menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Pelayanan Angkutan serta sanggup untuk melaksanakan semua ketentuan dan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

5. Demikian permohonan kami dan atas perkenan Bapak, kami ucapkan terimakasih.

PIMPINAN PERUSAHAAN/KOPERASI,

Meterai
Rp6000,-

Tembusan:

- 1.
- 2.
3. dst.

(Nama Jelas)

PERMOHONAN PENAMBAHAN KENDARAAN PADA IZIN
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR
UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

PERMOHONAN PENERBITAN SK IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN DAN KARTU
PENGAWASAN

NAMA PERUSAHAAN / KOPERASI *)

Alamat lengkap Nomor Telepon

Nomor :
 Klasifikasi : Kepada
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Permohonan persetujuan Yth.
 Penambahan Kendaraan pada
 Izin Penyelenggaraan Angkutan
 Orang Dengan Kendaraan Bermotor
 Umum Tidak Dalam Trayek
 Pelayanan di-

... ..

1. Mengacu pada Pasal 179 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, bersama ini kami dari PT./Koperasi..... mengajukan permohonan untuk penambahan kendaraan pada izin penyelenggaraan Angkutan Orang Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek pelayanan ,dengan data sebagai berikut:
 - a. Keterangan Pemohon
 - 1) Nama Perusahaan :
 - 2) Nama Pimpinan Perusahaan :
 - 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
 - 4) Alamat Perusahaan Lengkap termasuk:
 - a) Nomor Telepon dan Faksimili :
 - b) E-m ail :
 - 5) Alamat Pool/Usaha Lengkap termasuk:
 - a) Luas Areal Parkir Armada :
 - b) Nomor Telepon dan Faksimili :
 - c) E-m ail :
 - b. Keterangan Izin Penyelenggaraan
 - 1) Nomor SK Izin Penyelenggaraan :
 - 2) Masa Berlaku SK Izin Penyelenggaraan :
 - 3) Nomor Surat Pelaksanaan Keputusan Izin :
 - 4) Masa Berlaku Surat Pelaksanaan Keputusan I :
 - 5) Jumlah Kendaraan yang Diizinkan :.....Unit
2. Pelayanan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang akan dilayani dan jumlah penambahan kendaraan yang akan dioperasikan adalah:

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Kendaraan	Kapasitas (orang)

3. Bersama ini sebagai bahan pertimbangan disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri atas:
 - a. laporan pelayanan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang dilayani;
 - b. surat permohonan penambahan kendaraan; dan
 - c. salinan Surat Keputusan penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang telah dimiliki.
4. Dalam hal permohonan kami dapat disetujui, kami bersedia menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Pelayanan Angkutan serta sanggup untuk melaksanakan seketentuan dan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek selambat - lambatnya 6 (enam) bulan setelah permohonan ini disetujui.
5. Demikian permohonan kami dan atas perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

PIMPINAN PERUSAHAAN/KOPERASI,

Meterai
Rp6000,-

Tembusan:

(Nama Jelas)

- 1
- 2
- 3 dst

- c. surat dari Kepolisian untuk dokumen yang hilang dan bukti pengumuman terhadap dokumen yang hilang di media massa; dan
- d. melampirkan bukti dokumen yang rusak.

4. Demikian permohonan kami dan atas perkenan Bapak, kami ucapkan terimakasih.

PIMPINAN PERUSAHAAN/KOPERASI,

Meterai
Rp6000,-

(Nama Jelas)

Tembusan:

- 1.
- 2.
- 3. dst

PERMOHONAN PERUBAHAN PENGURUS PERUSAHAAN
IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM
TIDAK DALAM TRAYEK

NAMA PERUSAHAAN / KOPERASI *)

Alamat lengkap	Nomor Telepon
Nomor :	
Klasifikasi :	Kepada
Lampiran : 1 (satu) berkas	
Perihal : Permohonan Perubahan Pengurus Perusahaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Pelayanan	Yth. di-

1. Mengacu pada Pasal 179 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, bersama ini kami dari PT/Koperasi.....mengajukan permohonan perubahan pengurus perusahaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Pelayanan, dengan data sebagai berikut:
 - a. Keterangan Pemohon
 - 1) Nama Perusahaan :
 - 2) Nama Pimpinan Perusahaan :
 - 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
 - 4) Akta Pendirian dan Perubahannya :
(Nama Notaris, Nomor dan Tanggal)
 - 5) Pengesahan Menteri Hukum dan :
Hak Asasi Manusia (Nomor dan Tanggal)
 - 6) Alamat Perusahaan Lengkap termasuk:
 - a) Nomor Telepon dan Faksimili :
 - b) E-mail :
 - b. Keterangan Izin Penyelenggaraan
 - 1) Nomor SK Izin Penyelenggaraan :
 - 2) Masa Berlaku SK Izin Penyelenggaraan:.....
 - 3) Nomor Surat Pelaksanaan Keputusan :.....
Izin
 - 4) Masa Berlaku Surat Pelaksanaan :.....
Keputusan Izin
 - 5) Jumlah Kendaraan yang Diizinkan :.....Unit
2. Dikarenakan adanya perubahan pengurus pada perusahaan kami maka dimohon kiranya dilakukan perubahan pada dokumen Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Pelayananyang kami miliki.
3. Bersama ini sebagai bahan pertimbangan disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari :
 - a. Salinan akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir;
 - b. Salinan bukti pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. Salinan Tanda Daftar Perusahaannya
 - d. Salinan surat keterangan domisili perusahaan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

- e. Menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
 - f. Salinan Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
4. Demikian permohonan kami dan atas perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

PIMPINAN PERUSAHAAN/KOPERASI

Meterai

Rp6000,-

Tembusan:

(Nama Jelas)

- 1.
- 2.
3. dst

PERMOHONAN PENGGANTIAN KENDARAAN ATAU PEREMAJAAN
KENDARAAN PADA IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN
KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

NAMA PERUSAHAAN / KOPERASI *)

Alamat lengkap Nomor Telepon

Nomor :
 Klasifikasi : Kepada
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Permohonan Penggantian Kendaraan Yth.
 atau Peremajaan Kendaraan pada
 Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang
 Dengan Kendaraan Bermotor Umum
 Tidak Dalam Trayek Pelayanan di-

1. Mengacu pada Pasal 179 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, bersama ini kami dari PT./Koperasi.....mengajukan permohonan untuk penggantian kendaraan atau peremajaan kendaraan pada Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Pelayanan ,dengan data sebagai berikut:

a. Keterangan Pemohon

- 1) Nama Perusahaan :
- 2) Nama Pimpinan Perusahaan :
- 3) Alamat Perusahaan Lengkap termasuk:

 - a) Nomor Telepon dan Faksimili :
 - b) E-m ail :

- 4) AlamatPool/Usaha Lengkap termasuk :

 - a) Luas Areal Parkir Armada :
 - b) Nomor Telepon dan Faksimili :
 - c) E-m ail :

b. Keterangan Izin Penyelenggaraan

- 1) Nomor SK Izin Penyelenggaraan :.....
- 2) Masa Berlaku SK Izin Penyelenggaraan :.....
- 3) Nomor Surat Pelaksanaan Keputusan Izin :.....
- 4) Masa Berlaku Surat Pelaksanaan Keputusan Izin :.....
- 5) Jumlah Kendaraan yang Diizinkan :..... Unit

2. Pelayanan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang akan dilayani dan jumlah kendaraan yang akan diganti atau diremajakan adalah:

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Kendaraan	Kapasitas (orang)

3. Bersama ini sebagai bahan pertimbangan disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari :
- a. Salinan Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
 - b. Salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) kendaraan pengganti;
 - c. Salinan kartu bukti lulus uji berkala kendaraan pengganti;

- d. Salinan kartu pengawasan kendaraan yang diganti; dan
- e. Salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT).

4. Demikian permohonan kami dan atas perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

PIMPINAN PERUSAHAAN/KOPERASI

Meterai
Rp6000,-

Tembusan:

(Nama Jelas)

- 1.
- 2.
- 3. dst

PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN
KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK
(PEMBUKAAN CABANG PERUSAHAAN)

NAMA PERUSAHAAN / KOPERASI *)

Alamat lengkap Nomor Telepon

Nomor :
 Klasifikasi : Kepada
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Permohonan Pembukaan Cabang Yth.
 Perusahaan Penyelenggaraan Angkutan
 Orang Dengan Kendaraan Bermotor
 Umum Tidak Dalam Trayek Pelayanan
 di-

1. Mengacu pada Pasal 179 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, bersama ini kami dari PT/Koperasi..... mengajukan permohonan untuk pembukaan cabang perusahaan penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek pelayanan, dengan data sebagai berikut;
 - a. Keterangan Pemohon
 - 1) Nama Perusahaan :
 - 2) Nama Pimpinan Perusahaan :
 - 3) Akta Pendirian dan Perubahannya :
(Nama Notaris, Nomor dan Tanggal)
 - 4) Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Nomor dan Tanggal) :
 - 5) Alamat Perusahaan Lengkap termasuk:
 - a) Nomor Telepon dan Faksimili :
 - b) E-mail :
 - 6) Alamat Perusahaan Cabang termasuk :
 - a) Nomor Telepon dan Faksimili :
 - b) E-mail :
 - 7) Alamat Pool/Usaha Cabang termasuk :
 - a) Luas Areal Parkir Armada :
 - b) Nomor Telepon dan Faksimili :
 - c) E-mail :
2. Pelayanan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang akan dilayani dan jumlah kendaraan yang akan dioperasikan adalah:

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Kendaraan	Kapasitas (orang)

3. Bersama ini sebagai bahan pertimbangan disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri atas:
 - a. akta pendirian badan hukum dan/atau perubahan terakhir;
 - b. bukti pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan hukum ;
 - f. surat keterangan domisili badan hukum yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

- g. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan angkutan umum tidak dalam trayek, bermeterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan;
 - h. surat pernyataan kesanggupan memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor, bermeterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan;
 - i. surat Perjanjian antara pemilik kendaraan atau anggota koperasi dengan Perusahaan Angkutan Umum yang berbentuk badan hukum Koperasi;
 - j. memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan mampu menampung sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki dan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pemerintah setempat yang menyatakan luasnya mampu menyimpan kendaraan sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki;
 - k. terdapat kebutuhan kendaraan sesuai dengan hasil evaluasi dan penetapan kebutuhan kendaraan bagi Angkutan Taksi dan Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu; dan
 - l. rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan yang dituangkan dalam bentuk dokumen.
4. Dalam hal permohonan kami dapat disetujui, kami bersedia untuk menandatangani Surat Perjanjian/ Kontrak Pelayanan Angkutan serta sanggup untuk melaksanakan semua ketentuan dan izin penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah permohonan ini disetujui.
5. Demikian permohonan kami dan atas perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

PIMPINAN PERUSAHAAN /KOPERASI

Meterai
Rp6000,-

(Nama Jelas)

Tembusan:

- 1.....;
- 2.
- 3. dst

FORMULIR LAPORAN REALISASI IZIN OPERASI ANGKUTAN
NAMA PERUSAHAAN / KOPERASI

Alamat lengkap Nomor Telepon

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Laporan Realisasi Izin Operasi Kepada
Angkutan Yth. Direktur Jenderal/Gubernur/Bupati/Walikota
Di

LAPORAN REALISASI ANGKUTAN

Nama Perusahaan / Koperasi :
Nomor Induk Perusahaan :
Nama Pimpinan Perusahaan :
Alamat Perusahaan :

NO	NOMOR KENDARAAN	KAPASITAS	TANGGAL SEWA		JUMLAH		TUJUAN	ONGKOS SEWA / HARI
			MULAI	AKHIR	HARI SEWA	PENUMPANG DI ANGKUT		

PIMPINAN PERUSAHAAN / KOPERASI / PERORANGAN.....

(Nama Jelas

Tembusan :

- 1..... ;
- 2..... ;
3. dst

PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN OPERASI ANGKUTAN

Nomor : Banjarmasin,
Lampiran ;
Perihal : Penolakan Permohonan Izin Operasi Kepada
Angkutan Yth

di-

1. Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor..... tanggal perihal....., bersama ini disampaikan bahwa kami tidak dapat mengabulkan / menyetujui permohonan Saudara dengan pertimbangan sebagai berikut:
a.....;
b.....;
c.....
2. Demikian untuk menjadikan maklum.

.....,

(-----)

Tembusan Yth.
1..... ;
2.....;
3.dst.

LAPORAN REKAPITULASI PERIZINAN ANGKUTAN

Nomor
Lampiran
Perihal

Laporan Rekapitulasi Izin Angkutan Umum
Tidak Dalam Trayek Pelayanan

K e p a d a
Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Up. Direktur Angkutan dan Multimoda

Di -

JAKARTA

1. Menunjuk Keputusan Menteri Perhubungan No tanggal.t
entang Penyelenggaraan Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek, bersama ini kami
sampaikan rekapitulasi perizinan Angkutan Umum Tidak Dalam
Trayek Pelayanan, untuk Provinsi/ Kabupaten / Kota
.....hingga bulan tahun.... sebagaimana terlampir;
2. Demikian kami laporkan untuk menjadi periksa.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....

(.....)

Tembusan Yth. :

- 1.....
- 2
3. Dst.

REKAPITULASI ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

Untuk Pelayanan

KODE PERUSAHAAN	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT PERUSAHAAN	NAMA PIMPINAN	AKHIR MASA BERLAKU IZIN OPERASI	JUMLAH KENDARAAN	JENIS KENDARAAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI

KABUPATEN/KOTA.....

(.....)

LAPORAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Laporan Hasil Pengendalian dan Kepada
Pengawasan Angkutan Orang Dengan
Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam
Trayek Pelayanan

Yth

di-

Jakarta

1. Dasar :

- a. Keputusan Menteri Perhubungan No tahuntentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
- b. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat/Gubernur/Bupati/Walikota No tahuntentang Penetapan Kebutuhan Kendaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Pelayanan ;
- c.....
- d

2. Sehubungan dengan butir 1 di atas, bersama ini kami laporkan temuan pelanggaran sebagai berikut:

NO.	TANGGAL TEMUAN	NAMA PO.	JENIS PELANGGARAN	KLASIFIKASI PELANGGARAN

- 3. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, terlampir disampaikan Berita Acara temuan pelanggaran terhadap sejumlah kendaraan tersebut di atas;
- 4. Demikian untuk menjadi periksa.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
(.....)

Tembusan Yth. :
1.....
2
3. dst.

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

SAHBIRIN NOOR